



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2020 - 2024



REVISI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Revisi Rencana Strategis (Renstra) Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020-2024 yang merupakan kerangka dan acuan kerja bagi seluruh unit kerja pada jajaran Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, aspiratif dan akuntabel.

Revisi Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian Revisi II Tahun 2020 –2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Revisi II Tahun 2020-2024, dan diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian dan Sasaran Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ingin diwujudkan dalam periode 2020-2024 adalah; (i) Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima, (ii) Terwujudnya Pengelolaan Manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel, dan (iii) Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas

Jakarta, 29 November 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	4
A. Visi	4
B. Misi	5
C. Tujuan.....	5
D. Sasaran	5
BAB III ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN	9
A. Arah dan Kebijakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	9
B. Strategi Sekretariat Ditjen Peternakan Dan Kesehatan Hewan	9
C. Kerangka Regulasi.....	11
D. Kerangka Kelembagaan.....	11
E. Alur Kinerja Sekretariat	11
F. Rincian Kegiatan Operaional	13
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
A. Target Kinerja	16
B. Kerangka Pendanaan	21
BAB V PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran dan IKSK Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – 2024	6
Tabel 3.1. Alur Kinerja Sekretariat	12
Tabel 4.1 Target Kinerja Setditjen PKH 2020-2024	17
Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Sekretariat Ditjen PKH	21
Tabel 4.3. Kerangka Pendanaan Per Output Sekretariat Ditjen PKH	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Ditjen PKH	3
Gambar 2.1. Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi.....	8
Gambar 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Sekretariat
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut sebagai Setditjen PKH adalah unit kerja eselon II di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tugasnya secara umum adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memasuki era Pertanian 4.0 dalam melaksanakan tugasnya Setditjen PKH akan melaksanakan perubahan-perubahan dalam pelayanannya menggunakan aplikasi digital. Dalam melaksanakan tugas tersebut Setditjen PKH menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Ditjen PKH; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ditjen PKH.

Setditjen PKH dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal. Pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan oleh unit kerja yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Umum, Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut disajikan pada Gambar 1.1 berikut.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam menyusun rencana strategis Setditjen PKH untuk tahun 2020 – 2024 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2020 – 2024 sebagai bagian integral untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Sehingga dalam penetapan tujuan dan sasaran merujuk pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis untuk seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Pada dasarnya visi untuk tahun 2020 – 2024 adalah visi yang disampaikan oleh presiden berupa:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”

Untuk mewujudkan visi Bersama tersebut maka Kementerian Pertanian berusaha dengan mewujudkan kesejahteraan petani dengan peningkatan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Sedangkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu yang sama ingin mewujudkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan. Visi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah **“Terwujudnya Peternakan Indonesia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju, Mandiri dan Modern”**.

Setditjen PKH sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unit eselon 2 berusaha menjalankan visi **“Pelayanan Prima Mewujudkan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan”**.

Akuntabilitas kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan diartikan bahwa dalam rangka pencapaian program Ditjen PKH sebagaimana dari rencana strategis Ditjen PKH maka Setditjen PKH mempunyai tanggungjawab agar pencapaian kinerja tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (sesuai dengan kaidah akuntabilitas kinerja) sebagai bagian untuk mendukung visi pembangunan nasional yang didukung oleh keinginan maksud dan tujuan pembangunan Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal PKH.

B. MISI

Sebagai penjabaran dari visi pembangunan nasional dan dukungan Kementerian Pertanian dan Ditjen PKH maka setditjen PKH akan mengemban misi:

1. Mengembangkan perencanaan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebijakan terutama di era 4.0;
2. Meningkatkan kualitas kerjasama dan hubungan masyarakat yang transparan dan tetap menjaga kepuasan pelanggan;
3. Meningkatkan kualitas penataan dan penguatan organisasi tatalaksana dan peningkatan kualitas SDM aparatur di era disrupsi kebijakan;
4. Meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan advokasi hukum;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang cepat dan *real time*;
6. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan mensinergi aspek perencanaan;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan rekomendasi dengan menerapkan sistem online dan digital terintegrasi dengan sektor dan subsektor lainnya.

C. TUJUAN

Berdasarkan Misi yang telah dirumuskan tersebut maka Setditjen PKH menetapkan tujuan yang hendak dicapai organisasi sebagai berikut:

1. Menghasilkan perencanaan berbasis Kinerja yang sepenuhnya didasarkan pada sistem e-planning;
2. Menyajikan data dan informasi cepat, tepat, akurat, partisipatif dan dapat disetujui oleh semua pihak.
3. Mewujudkan organisasi yang tepat isi, hemat struktur dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.
4. Mewujudkan SDM ASN Setditjen PKH yang berorientasi Kinerja.
5. Menghasilkan peraturan Perundang-undangan yang lebih simpel dan tidak memberatkan para pengguna.
6. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, tepat waktu, transparan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
7. Mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib administrasi, taat hukum, fisik, serta *maintenance*.

D. SASARAN

Untuk mewujudkan misi dan tujuan secretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka sasaran dan indikator kinerja sasaran

kegiatan yang dirinci per tahunnya dari tahun 2020-2024 sebagaimana dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Sasaran dan IKSK Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan		IKSK	Satuan
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	1 Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai
		2 Tingkat kepuasan unit eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		3 Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Level
		4 Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH	Persentase
		5 Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal	Persentase
		6 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat (BPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		7 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		8 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Indrapuri yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		9 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Siborongborong yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		10 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Padang Mangatas yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		11 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Sembawa yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		12 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Pelaihari yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		13 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul	Skala Likert (1-4)

			dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Denpasar yang diberikan	
		14	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		15	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		16	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		17	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		18	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		19	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		20	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Medan yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		21	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Bukit Tinggi yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		22	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Bandar Lampung yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		23	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Banjarbaru yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		24	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Subang yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		26	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi yang diberikan	Skala Likert (1-4)
		27	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang diberikan	Skala Likert (1-4)
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel.	1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)
		2	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pakan terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)
		3	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)

		4	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)
		5	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)
3	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai

Pada tabel tersebut diatas, sasaran kegiatan menyangkut 3 hal penting yaitu: (i) terwujudnya birokrasi Ditjen PKH yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, (ii) Terwujudnya Pengelolaan Manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel, dan (iii) terkelolanya anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas dengan indikatornya ditentukan dari Nilai Kinerja anggaran Ditjen PKH.

Nilai PMPRB menyangkut 8 area perubahan reformasi birokrasi sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.1. Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

8 area perubahan reformasi birokrasi tersebut yaitu:

1. *Mental Aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel*
2. *Organisasi: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran*
3. *Tatalaksana: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good government*
4. *Peraturan Perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif*
5. *Sumber Daya Manusia Aparatur: SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera*
6. *Pengawasan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN*
7. *Akuntabilitas: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi*
8. *Pelayanan Publik: Pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat*

Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga yang menyebutkan bahwa nilai kinerja anggaran tingkat eselon I / program adalah berdasarkan nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek implementasi tingkat eselon I/program dan rata-rata kinerja anggaran tingkat satuan kinerja/kegiatan di lingkup kewenangan Ditjen PKH.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu:

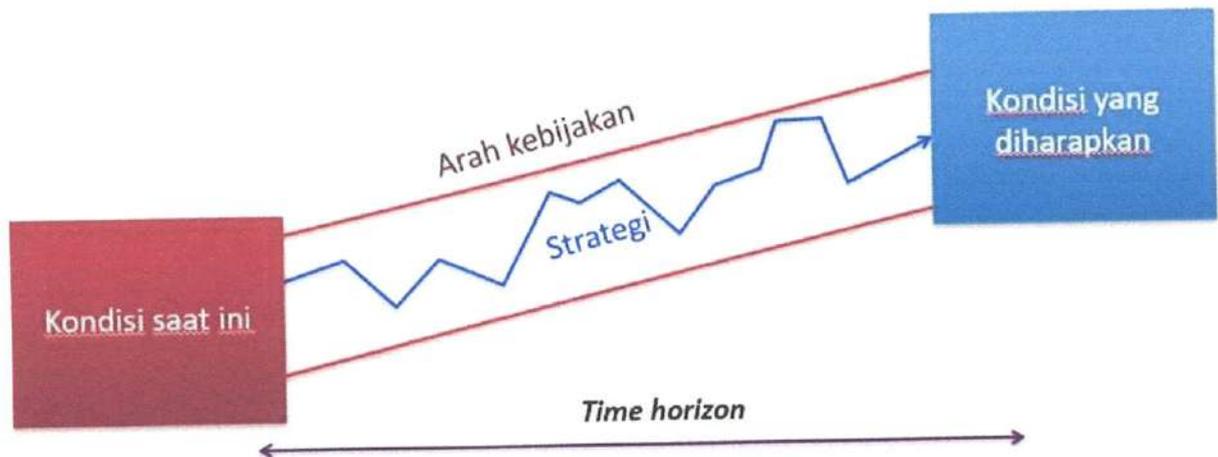
1. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
2. Mengembangkan pakan ternak
3. Mengelola kesehatan hewan
4. Pengolahan dan pemasaran hasil ternak
5. Penjaminan pangan asal hewan ternak
6. Menjalankan dan mendukung dengan aspek manajemen kesekretariatan.

Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut maka langkah operasional yang akan ditempuh adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan kualitas bibit/benih ternak secara berkelanjutan
2. Menyelenggarakan praktek budidaya peternakan secara efektif dan efisien
3. Mengelola kesehatan hewan ternak dan hewan lainnya dalam meningkatkan produktivitas dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner dalam meningkatkan kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran produk serta investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
6. Menerapkan reformasi birokrasi Ditjen PKH menuju birokrasi professional

B. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sebagai pendukung utama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya dibidang pengembangan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan yang unggul dan berdaya saing, mengembangkan kebijakan berbasis penelitian (*research based police*) dan reformasi birokrasi Ditjen PKH maka strategi Setditjen PKH dikembangkan dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi Ditjen PKH yang memiliki tujuan dan sasaran.



Gambar 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Secara definisi yang dimaksud strategi adalah upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan kedepan. Strategi dapat disusun dalam jangka menengah yaitu tahun 2020-2024 dan harus merupakan bentuk respon organisasi Setditjen PKH atas perubahan lingkungan strategis organisasi. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan internal dan eksternal dapat dipetakan dinamika tugas Setditjen PKH secara holistik. Sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran maka Setditjen PKH telah menetapkan strateginya sebagai berikut:

1. Strategi Umum

- a. Melakukan dan meningkatkan koordinasi untuk mencapai sinergitas antara program dan kegiatan teknis yang telah dirumuskan.
- b. Melakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan dan latihan berkelanjutan;
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Menerapkan struktur organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi untuk mencapai organisasi yang lebih profesional;
- e. Menyeimbangkan jumlah dan proporsi SDM aparatur teknis yang mencakup pejabat administrasi, pejabat fungsional dan pejabat jabatan tinggi;

Dengan strategi umum tersebut maka diharapkan Setditjen PKH mampu mewujudkan birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien, berorientasi pada layanan prima dan dapat mengelola anggaran Ditjen PKH yang akuntabel dan berkualitas.

C. Kerangka Regulasi

Setditjen PKH menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN termasuk unit organisasi eselon 2 yang bersifat *supporting*. Sehubungan dengan fungsinya tersebut maka dalam kurun waktu 2020-2024 Setditjen PKH memerlukan regulasi untuk menjadikan profesional dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen PKH, baik melalui penyempurnaan regulasi yang sudah ada maupun membuat regulasi baru.

D. Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan Ditjen PKH terdiri dari kelembagaan Pusat dan Daerah. Kelembagaan Pusat terdiri dari unit kerja eselon II yang meliputi Setditjen, DitPakan, DitBitpro, Dit Keswan, DitKesmavet dan DitPPHNak. Sedangkan kelembagaan daerah dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yg meliputi :

1. Balai Embrio Ternak Cipelang
2. Balai Inseminasi Buatan Lembang
3. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang
4. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
5. Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan Bogor
6. Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi
7. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah
8. Balai Besar Veteriner Wates
9. Pusat Veterinaria Farma Surabaya
10. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
11. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh Indrapuri
12. Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau di Siborong-borong
13. Balai Penyidikan Pengujian Veteriner Regional 1 Medan
14. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas
15. Balai Penyidikan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi
16. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam Sembawa
17. Balai Penyidikan Pengujian Veteriner Regional III bandar Lampung
18. Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik Pelaihari
19. Balai Penyidikan Pengujian Veteriner Regional V Banjar Baru
20. Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan
21. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali
22. Balai Besar Veteriner Denpasar
23. Loka Jayapura

E. Alur Kinerja Sekretariat

Setditjen PKH merupakan unsur penting dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk selaras dalam

mendukung pencapaian sasaran program. Penyelarasan tersebut secara internal menyangkut bagian perencanaan, keuangan dan perlengkapan, bagian umum dan bagian evaluasi dan layanan rekomendasi. Selanjutnya tugas-tugas tersebut dikoordinasikan dan diselaraskan dengan seluruh direktorat teknis lingkup Ditjen PKH yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan pendanaannya.

Tabel 3.1. Alur Kinerja Sekretariat

Input	Kegiatan Operasional	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Outcome
1. Anggaran 2. SDM 3. Sarana dan Prasarana 4. Data dan Informasi 5. NSPK 6. Kelembagaan Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan 2. Penyusunan Anggaran 3. Penyusunan Kerjasama Program dan Kehumasan 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi 6. Pelayanan rekomendasi 7. Peningkatan penerapan Peraturan Perundang-undangan Bidang peternakan dan kesehatan hewan 8. Peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan dan aset 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik 10. Peningkatan kualitas aparatur 11. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan Bidang peternakan dan kesehatan hewan 12. Dukungan kesekretariatan lainnya	1. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima a. Nilai PM RB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi
		2. Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas a. Nilai Kinerja (NK) Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Akuntabilitas Kinerja Program/ Kegiatan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk menggerakkan Setditjen PKH memerlukan input berupa anggaran, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, data dan informasi, dan NSPK, serta kelembagaan Ditjen PKH. Berdasarkan input tersebut maka seluruh kegiatan operasional dapat dilakukan yaitu: (i) Penyiapan bahan rumusan kebijakan, program dan kegiatan; (ii) Penyusunan kerjasama program; (iii) Penyusunan anggaran; (iv) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan; (v) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi; (viii) Pelayanan rekomendasi; (vii) Peningkatan penerapan Peraturan Perundang-undangan Bidang PKH; (viii) Peningkatan kualitas pertanggung jawaban keuangan dan aset; (ix) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (x) Peningkatan kualitas aparatur; (xi) Peningkatan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Bidang PKH; serta (xii) Dukungan kesekretariatan lainnya untuk menjalankan kegiatan operasional tersebut.

Sesuai dengan input dan kegiatan operasional yang dijalankan, kinerja Setditjen PKH dapat diukur dari terwujudnya birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima serta terkelolanya anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akuntabel dan berkualitas. Sedangkan outcome antara dari kegiatan ini adalah nilai PMPRB,

tingkat kepuasan layanan publik dan nilai kinerja anggaran yang akan menghasilkan outcome yaitu sebagai dampak dari outcome antara tersebut yaitu terjadinya reformasi birokrasi dan akuntabilitas Kinerja Program/Kegiatan.

F. Rincian Kegiatan Operasional

1. Kegiatan Bagian Perencanaan

- a. *Penyusunan rencana dan program.* Untuk menghasilkan program dan kegiatan yang operasional, ditempuh melalui: penyusunan bahan kebijakan program; rencana kerja pemerintah (RKP), penetapan kinerja, nota keuangan, rencana kerja (Renja) dan pedoman; koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan serta perencanaan program; dan peningkatan kualitas perencanaan.
- b. *Penyusunan anggaran.* Dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan, diperlukan perencanaan anggaran yang tepat dalam mendukung pencapaian target yang sudah ditetapkan, yang ditempuh melalui: penyusunan standar pembiayaan kegiatan; sosialisasi perencanaan anggaran; pedoman; dan penerbitan dokumen anggaran mendukung pencapaian target program/kegiatan.
- c. *Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan informasi publik.* Untuk mendukung kegiatan tersebut ditempuh melalui: penyebaran informasi, penyusunan profil, pameran dan sosialisasi kebijakan pembangunan peternakan dan keswan; pelaksanaan kegiatan berbantuan dan kerjasama luar negeri; penelaahan dokumen kerjasama luar negeri; dan penyusunan kinerja kegiatan berbantuan.

2. Kegiatan Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- a. *Pelaksanaan urusan perbendaharaan,* akan ditempuh melalui: penatausahaan pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran; pembinaan administrasi pengelolaan keuangan; pengelolaan DIPA; penyelesaian kerugian negara; penerbitan Surat Perintah Membayar; Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); bahan evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- b. *Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi,* yang akan difasilitasi melalui: penyusunan laporan keuangan semesteran tingkat UAPPA; penyusunan laporan keuangan bulanan tingkat UAKPA kantor pusat; penyusunan laporan serapan DIPA; monitoring serapan anggaran; sosialisasi dan pemantauan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SAK.

- c. *Pelaksanaan urusan perlengkapan*, akan ditempuh melalui: penyusunan laporan BMN; rencana pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN; penguatan dan perawatan kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran; analisis kebutuhan serta pendistribusian BMN dan pelaksanaan apresiasi barang dan jasa.

3. Kegiatan Bagian Umum

- a. *Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan urusan kepegawaian*, meliputi: pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi; evaluasi, penyempurnaan, pengembangan dan pengelolaan jabatan fungsional; evaluasi dan pengembangan budaya kerja dan pelayanan publik; perencanaan dan pengembangan pegawai, evaluasi kinerja pegawai, evaluasi dan penilaian kinerja UPT serta penyusunan Indeks Penerapan Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- b. *Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum*, meliputi: penyiapan dan penyusunan bahan peraturan perundangan (UU, PP, Perpres, Permentan/Kepmentan, Keputusan Dirjen) sesuai dengan amanat undang-undang dan kebutuhan masyarakat; evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan; harmonisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dokumentasi peraturan perundang-undangan dan litigasi.
- c. *Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga*, melalui: penataan arsip, penataan penyimpanan dokumen dan kepustakaan; apresiasi, pembinaan dan penguatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keamanan serta pelayanan rekomendasi online.

4. Kegiatan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi

- a. *Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi*. Pelaksanaan kegiatan ini akan dicapai melalui: pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data, dan dipublikasikan dalam buku statistik; validasi data dan informasi; pengembangan sistem informasi; pengembangan sistem perstatistikan dalam bentuk instrument; dan pemeliharaan data.
- b. *Penyiapan analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program*, melalui: penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan; mengumpulkan, mengolah, menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan; menyiapkan bahan analisis

pelaksanaan program dan kegiatan; menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

- c. *Penyiapan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan*, melalui: penyiapan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan; menyiapkan bahan laporan lingkup Kementerian Pertanian rapat pimpinan dan; bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- d. *Layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan* melalui: penyusunan standar operasional dan prosedur pelayanan rekomendasi; fasilitasi pelayanan konsultasi teknis; serta pelayanan rekomendasi online; uji petik persyaratan administrasi layanan rekomendasi; melakukan rekapitulasi permohonan rekomendasi; dan melakukan penyusunan konsep penyelesaian pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan layanan rekomendasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Setditjen PKH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan target kinerja kegiatan untuk tahun 2020 – 2024. Target kinerja tersebut tercantum dalam Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang terdiri dari 31 indikator kinerja yaitu: (1) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (2) Tingkat kepuasan unit eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan (3) Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (4) Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH (5) Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal (6) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat (BPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan (7) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden yang diberikan (8) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Indrapuri yang diberikan (9) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Siborongborong yang diberikan (10) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Padang Mangatas yang diberikan (11) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Sembawa yang diberikan (12) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Pelaihari yang diberikan (13) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Denpasar yang diberikan (14) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan (15) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang diberikan (16) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang diberikan (17) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang diberikan (18) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros yang diberikan (19) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar yang diberikan (20) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Medan yang diberikan (21) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Bukit Tinggi yang diberikan (22) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Bandar Lampung yang diberikan (23) Indeks

kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Banjarbaru yang diberikan (24) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Subang yang diberikan (25) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan (26) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi yang diberikan (27) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang diberikan (28) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan ketatausahaan. (29) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pakan terhadap layanan ketatausahaan (30) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan ketatausahaan. (31) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan ketatausahaan (32) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan ketatausahaan. (33) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Target kinerja untuk masing-masing indikator disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Target Kinerja Setditjen PKH 2020-2024

Sasaran Kegiatan	IKSK	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024		
1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	32,75	33,5	34	35,5
		2	Tingkat kepuasan unit eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		3	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Level	3,00	3,00	3,00	3,00
		4	Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH	Persentase	75,00	80,00	85,00	85,00

	5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal	Persentase	80,00	85,00	90,00	90,00
	6	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat (BPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	7	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Indrapuri yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	9	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Siborongborong yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	10	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Pdang Mangatas yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	11	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Sembawa yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00

	12	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	13	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Denpasar yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	14	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	15	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	16	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	17	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	18	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	19	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
	20	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Medan yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00

		21	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Bukit Tinggi yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		22	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Bandar Lampung yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		23	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Banjarbaru yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		24	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (BVet) Subang yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		25	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		26	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		27	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya yang diberikan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel.	1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		2	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pakan terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00

		3	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		4	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
		5	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan ketatausahaan.	Skala Likert (1-4)	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai	88,68	88,93	90,32	90,85

Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah juga menetapkan target kerja dan rencana operasional kegiatan Setditjen PKH tahun 2020 – 2024. Target kerja terdiri dari empat layanan yaitu layanan dukungan manajemen eselon 1, layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran. Layanan dukungan manajemen eselon 1 terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan perbendaharaan, pelayanan hukum dan kepatuhan internal, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan perlengkapan, pelayanan rumah tangga, pelayanan humas dan protokoler, serta pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.

B. Kerangka Pendanaan

Pada dasarnya, pendanaan bersumber dari APBN, APBD, PMA, PMDN, Dana Perbankan, Swasta, kemitraan dan swadaya masyarakat. Anggaran APBN merupakan faktor pengungkit dalam perencanaan pembangunan dengan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya yaitu dana-dana non APBN sebagai pendorong jalannya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Rencana kebutuhan anggaran APBN untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020 – 2024 adalah sebesar Rp 2.581.300.121.000,-. Untuk dana APBN tersebut pengalokasiannya secara umum tercantum pada tabel 4.2 dan table 4.3 berikut ini.

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan per Output 2020-2024 Sekretariat Ditjen PKH

Kode	Output	Anggaran (Rp. 000,-)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
		422.810.457	485.091.457	511.600.653	562.760.718	619.038.790	2.581.300.121
950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	50.373.801	55.410.961	60.952.057	67.047.263	73.751.989	307.535.871
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	112.777.085	124.054.794	136.460.273	150.108.300	165.116.930	680.515.382
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	39.228.191	43.151.010	47.466.111	52.212.722	57.433.994	239.492.029
994	Layanan Perkantoran	220.431.580	242.474.738	266.722.212	293.394.433	322.733.876	1.345.758.839

Anggaran APBN tersebut merupakan kebutuhan anggaran untuk di Pusat maupun di UPT dan Daerah, dalam bentuk anggaran konsentrasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB V PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Setditjen PKH telah disusun berdasarkan acuan dari Rencana Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Revisi II tahun 2020-2024. Dalam menyusun rencana strategis ini telah memperhatikan kondisi umum dan potensi permasalahan sehingga menghasilkan tujuan dan sasaran setditjen PKH. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka telah disusun arah kebijakan dan strategi, kerangka baik yang menyangkut regulasi dan kelembagaan dan akhirnya berbagai target kinerja dan kerangka pendanaan bagi setditjen PKH sebagai bagian dari unit kerja Eselon I Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

LAMPIRAN 1

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2020-2024

UNIT ESELON II

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1. Nama Organisasi :
Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Tugas :
3. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan Kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi public di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal peternakan dan Kesehatan hewan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Program : Dukungan Manajemen

1. **Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Peternakan
Unit Kerja Eselon II : Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan**

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
IKSK. 1	Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
	<p>Deskripsi :</p> <p>Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal adalah nilai yang diperoleh dari penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (<i>self-assessment</i>) oleh unit kerja Sekretariat Jenderal.</p> <p>Penilaian mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB pada komponen Pengungkit baik Pemenuhan maupun Reform dan komponen Hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>
	<p>Sumber Data :</p> <p>Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN RB</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> <p>Perbandingan antara Target dan Nilai Maksimal yang dapat diperoleh Unit Kerja pada Komponen Pengungkit dikali 100%</p> <p>Satuan Pengukuran: Nilai Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit Bertanggungjawab :</p> <p>Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>
IKSK. 2	Tingkat kepuasan unit Eselon II di lingkup Ditjen Peternakan terhadap layanan Sekreariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberikan
	<p>Deskripsi :</p> <p>Tingkat Kepuasan Unit Eselon I/II terkait terhadap Layanan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum di lingkup Kementerian Pertanian yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit eselon I/II terkait dalam memperoleh pelayanan Biro Hukum Sekretariat Jenderal.</p>
	<p>Sumber Data :</p> <p>Data yang digunakan dalam Survei adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa daftar pegawai Unit Kerja lingkup Kementerian</p>

Pertanian yang melakukan interaksi dengan unit kerja di Biro Hukum selama 1 tahun terakhir.

Data primer diperoleh dengan melakukan survei langsung kepada masing-masing unit kerja eselon I atau II terkait lingkup Kementerian Pertanian

Cara Menghitung :

Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model service quality (SERVQUAL) yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry.

Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan (unit kerja eselon I/II) terhadap pelayanan Biro Hukum yang terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: *tangibles* (berwujud), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (kepastian), dan *emphaty* (empati). Survei tingkat kepuasan Eselon I/II terkait dilakukan dengan pengambilan sampling. Penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan rumus Slovin (Umar 2003):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

N: jumlah sampel;

N: jumlah populasi;

E: batas toleransi kesalahan

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan (Januari – Desember (selama 1 tahun))

Unit Bertanggungjawab :

Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

IKSK. Level maturitas penyelenggaraan SPIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Deskripsi :

Berdasarkan PP 60 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Perka BPKP nomor 4 tahun 2016, maturitas penerapan SPIP dapat dibagi menjadi 5 (lima) level, yaitu:

- Level 0 → Belum ada
- Level 1 → Rintisan
- Level 2 → Berkembang
- Level 3 → Terdefinisi
- Level 4 → Terkelola dan terukur
- Level 5 → Optimum

Sumber Data :

Inspektorat Jenderal
<p>Cara Menghitung :</p> <p>Hasil penilaian oleh BPKP atas implementasi SPIP Ditjen Peternnakan dan Kesehatan Hewan yang direpresentasikan dalam bentuk level maturitas SPIP</p>
<p>Unit Bertanggungjawab :</p> <p>Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>
<p>IKSK. 4 Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen PKH yang ditindaklanjuti Ditjen PKH</p>
<p>Deskripsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi temuan BPK pada tahun sebelumnya • Identifikasi usulan tindak lanjut temuan BPK yang diberikan pada tahun berjalan (didasarkan atas bukti tindak lanjut yang telah di telaah oleh APIP) • Bandingkan keduanya, kemudian hitung rasio temuan yang di tindaklanjuti
<p>Sumber Data :</p> <p>Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>
<p>Cara Menghitung :</p> $\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan}}{\text{Total rekomendasi yang diberikan BPK pada tahun sebelumnya}} \right)$
<p>Unit Bertanggungjawab :</p> <p>Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>
<p>IKSK. 5 Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen PKH terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan Inspektorat Jenderal</p>
<p>Deskripsi :</p> <p>Hasil Pembahasan antara Itjen dengan Eselon I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi rekomendasi Inspektorat I, II, III, dan IV di Inspektorat Jenderal pada tahun sebelumnya • Identifikasi tindaklanjut Inspektorat I, II, III, dan IV di Inspektorat Jenderal pada tahun berjalan • Bandingkan keduanya, kemudian hitung rasio rekomendasi yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai
<p>Sumber Data :</p> <p>Inspektorat Jenderal</p>
<p>Cara Menghitung :</p>

$\left(\frac{\text{Rekomendasi Inspektora I, II, III, dan IV yang ditindaklanjuti Eselon I pada tahun sebelumnya}}{\text{Total rekomendasi Audit yang diberikan Inspektora I, II, III, dan IV pada tahun sebelumnya}} \right)$

Unit Bertanggungjawab :

Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

IKM unit pelayanan x 25

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BPMSOH) Gunung Sindur

IKSK. 7 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturaden yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturaden terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturaden dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

$$a. \left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :
 - a. IKM unit pelayanan x 25
4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturaden

IKSK. 8 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

$$a. \left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

$$a. \left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a. IKM unit pelayanan x 25

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT)
Indrapuri

IKSK. 9 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborongborong dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan

Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT)
Siborongborong

IKSK. 10 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas dilakukan

berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a. $\text{IKM unit pelayanan} \times 25$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas

IKSK. 11 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa

IKSK. 12 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor

19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Pelaihari

IKSK. 13 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan

layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT)
Denpasar

IKSK. 14 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas

kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Inseminasi Buatan (BIB)

15 Lembang yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

- a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

- a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

- a. $\text{IKM unit pelayanan} \times 25$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Embrio Ternak (BET)**16 Cipelang yang diberikan**

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet)

17 Wates yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :
Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Wates

**IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet)
18 Maros yang diberikan**

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Maros terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Maros dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan
Unit Bertanggungjawab : Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Maros
IKSK. 19 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar yang diberikan
<p>Deskripsi:</p> <p>Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.</p>
<p>Sumber Data:</p> <p>Kuisisioner Kepuasan Masyarakat</p>
<p>Cara Menghitung:</p> <p>Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online</p> <p>Penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang <ol style="list-style-type: none"> a. $\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$ 2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus <ol style="list-style-type: none"> a. $\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$ 3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus : <ol style="list-style-type: none"> a. IKM unit pelayanan x 25 4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar

**IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Medan
20 yang diberikan**

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Veteriner (B-Vet) Medan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Veteriner (B-Vet) Medan dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Veteriner (B-Vet) Medan

**IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bukit
21 Tinggi yang diberikan**

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Veteriner (B-Vet) Bukit Tinggi terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Veteriner (B-Vet) Bukit Tinggi dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Veteriner (B-Vet) Bukit Tinggi

IKSK. 22 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Bandar Lampung yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Veteriner (B-Vet) Bandar Lampung terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Veteriner (B-Vet) Bandar Lampung dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :
 - a. $IKM \text{ unit pelayanan} \times 25$
4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Veteriner (B-Vet) Bandar Lampung

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) 23 Banjarbaru yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Veteriner (B-Vet) Banjarbaru terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Veteriner (B-Vet) Banjarbaru dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

$$a. \left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

$$a. \left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :
 - a. IKM unit pelayanan x 25
4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Veteriner (B-Vet) Banjarbaru

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Veteriner (B-Vet) Subang yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Veteriner (B-Vet) Subang terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Veteriner (B-Vet) Subang dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

$$a. \left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a. IKM unit pelayanan x 25

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Veteriner (B-Vet) Subang

IKSK. 25 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

$$a. \left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

$$a. \left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a. IKM unit pelayanan x 25

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) Bekasi

IKSK. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Pusat Veteriner Farma 27 (Pusvetma) Surabaya yang diberikan

Deskripsi:

Sebagai instansi pelayanan publik, Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pengguna dan masyarakat secara umum. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, maka diperlukan pengukuran tingkat keberhasilan layanan berupa Survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik lingkup Kementerian Pertanian.

Sumber Data:

Kuisisioner Kepuasan Masyarakat

Cara Menghitung:

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya dilakukan berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang pedoman survey Kepuasan

Masyarakat unit kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.
Pengumpulan data dilakukan melalui survey secara online

Penghitungan:

1. Menghitung nilai rata-rata tertimbang

a.
$$\left(\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times 100\%$$

2. Menghitung nilai IKM menggunakan rumus

a.
$$\left(\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur}} \right) \times \text{Nilai penimbang}$$

3. Interpretasi nilai IKM menggunakan rumus :

a.
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

4. Nilai persepsi berdasarkan interval IKM

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit Bertanggungjawab :

Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya

SK.2 Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel

IKSK.1 Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan ketatausahaan

Deskripsi:

Nilai capaian tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

Sumber Data:

Kuesioner

Cara Menghitung :

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%).
2. Hitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn))/(\sum f)$.

4. Hitung indeks kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus $(X) = (\sigma n) \times (bn)$.
5. Jumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan --> Indeks kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit yang Terlibat:

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

SK.2 Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pakan Ternak yang efektif, efisien dan akuntabel

IKSK. Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pakan Ternak terhadap layanan ketatausahaan 1

Deskripsi:

Nilai capaian tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pakan Ternak terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Pakan Ternak

Sumber Data:

Kuesioner

Cara Menghitung :

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%).
2. Hitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn)) / (\sum f)$.
4. Hitung indeks kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus $(X) = (\sigma n) \times (bn)$.
5. Jumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan --> Indeks kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit yang Terlibat:

Direktorat Pakan Ternak

SK.2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Kesehatan Hewan yang efektif, efisien dan akuntabel
IKSK. 1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan ketatausahaan
	<p>Deskripsi: Nilai capaian tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Hewan terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Kesehatan Hewan</p>
	<p>Sumber Data: Kuesioner</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%). 2. Hitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$). 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn))/(\sum f)$. 4. Hitung indeks kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus $(X)=(\sigma n)x(b_n)$. 5. Jumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan --> Indeks kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4. <p>Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4) Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat: Direktorat Kesehatan Hewan</p>
SK.2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yang efektif, efisien dan akuntabel
IKSK. 1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan ketatausahaan
	<p>Deskripsi: Nilai capaian tingkat kepuasan pegawai Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner</p>
	<p>Sumber Data: Kuesioner</p>
	<p>Cara Menghitung :</p>

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%).
2. Hitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn)) / (\sum f)$.
4. Hitung indeks kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$.
5. Jumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan --> Indeks kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit yang Terlibat:

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

SK.2 Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang efektif, efisien dan akuntabel

IKSK. 1 Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan ketatausahaan

Deskripsi:

Nilai capaian tingkat kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Sumber Data:

Kuesioner

Cara Menghitung :

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%).
2. Hitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn)) / (\sum f)$.

4. Hitung indeks kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus $(X) = (\sigma n) \times (bn)$.
5. Jumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan --> Indeks kepuasan harusnya berada pada range 0 sampai dengan 4.

Satuan Pengukuran: Skala Likert (1-4)

Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize

Periode Data IKU: Tahunan

Unit yang Terlibat:

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

SK.2 Terkelolanya Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Akuntabel dan Berkualitas

IKSK. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Deskripsi :

Kinerja anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam dokumen anggaran

Nilai Kinerja Anggaran merupakan Nilai Kinerja Eselon I dengan menggunakan Aplikasi SMART DJA dimana:

1. $90\% < NK \leq 100\%$ dikategorikan sangat baik
2. $80\% < NK \leq 90\%$ dikategorikan baik
3. $60\% < NK \leq 80\%$ dikategorikan cukup atau normal
4. $50\% < NK \leq 60\%$ dikategorikan kurang
5. $NK \leq 50\%$ dikategorikan sangat kurang

Sumber Data :

Aplikasi SMART Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Cara Menghitung :

Nilai Kinerja Program berdasarkan nilai kinerja yang ditampilkan pada dashboard aplikasi SMART Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Unit Bertanggungjawab :

Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan